

## PERAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT : DISTRIBUSI ZAKAT DARI MUZAKKI KE MUSTAHIK PADA (BADAN AMIL ZAKAT) BAZ

Oleh : Wahyuddin Maguni

### Abstrak

Zakat adalah perintah dinul Islam yang ke-4, untuk wajib dilaksanakan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat dari tangan muzakki ke musthadiid, maka perlu peran dari badan amal zakat sebagai lembaga penyalur zakat yang resmi dan amanah, sehingga peran fungsi dan dari lembaga tersebut dapat maksimal, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap umat Islam secara makro.

Hal yang masih perlu digaris bawahi bahwa peranan fungsi manajemen dari badan amal zakat belum maksimal disamping dari kalangan muzakki terdapat kecenderungan yang terjun langsung ke tempat mustahik dalam mendistribusikan sendiri zakat mereka, sehingga pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal dan tidak merata serta tidak maksimal. Disamping itu seakan melupakan fungsi manajemen dari badan amal zakat sebagai lembaga resmi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat .

**Kata Kunci :** Fungsi Manajemen, dan distribusi zakat

### Abstract

*Zakat is the Islamic DINUL command 4th, for every human being must be carried out by claiming to be a Muslim, to deliver and distribute zakat from muzakki hand to musthadiid, it is necessary to the role of the agency as amal zakat zakat institution authorized dealer and trust, so that the role and functions of the agency can be a maximum, and then will have a positive impact on Muslims in macro.*

*Things that still need to be underlined that the management functions of the agency peranan amal zakat not been up there as well from the muzakki kecenderungan that go directly to the charity mustahik in distributing their own, so mapping the distribution into marginal and uneven, and not the maximum. Besides, it seemed to forget about the functions of the agency manajemen amal zakat as the official institutions of the collection and distribution of zakat.*

*Keywords: Management of Function, and zakat of distribution*

### A. Latar Belakang

Manajemen zakat, keberadaanya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan :

### 1. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ.

dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
2. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
3. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
4. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
5. Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
6. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.

---

<sup>2</sup> Ibit,48

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

### a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:<sup>3</sup>

1. Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam yang ke tiga oleh karena itu urusan ini harus di urus oleh sesama muslim.
2. *Mukallaf* yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat *amanah* atau jujur. sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.
6. Kesungguhan *amil* zakat dalam melaksanakan tugasnya. *Amil* zakat yang baik adalah *amil* zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.<sup>4</sup>

### B. Penggalan Sumber Zakat

Dalam penggalan sumber zakat, *Amil* harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadaranya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya :

---

<sup>3</sup> Ibit ,48

<sup>4</sup> Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, 48.

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan *kounter* penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat *konter* atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

### 3. Pengawasan Zakat

Secara *konsepsional* dan operasional pengawasan adalah suatu upaya *sistimatis*, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.<sup>5</sup>

Secara *menejerial* pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja *amil* zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.

---

<sup>5</sup> Ibit,65

- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.<sup>6</sup>

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:

- a) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b) Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengijinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c) Jenis anggaran meliputi :
  1. Anggaran pendapatan dan pengeluaran
  2. Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
  3. Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
  4. Anggaran kas Badan atau LAZ
  5. Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
  6. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
    - a. Data statistik atau akuntansi
    - b. Grafik pulang pokok (*break even*)
    - c. Audit operasional
    - d. Observasi pribadi

### C. Distribusi Zakat dan Pengembangannya

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

---

<sup>6</sup> Ibit,65

## 1. Distribusi Zakat

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para *muzakki*> harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang telah ditentukan oleh syari'at sebagaimana tercantum dalam firman Allah: Alquran, 9 : 60. yang artinya :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>7</sup>

**yang berhak menerima zakat ialah:**

1. **Orang fakir:** orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. **Orang miskin:** orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. **Pengurus zakat:** orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. **Muallaf:** orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. **Memerdekakan budak:** mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. **Orang berhutang:** orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. **Pada jalan Allah (sabilillah):** yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. **Orang yang sedang dalam perjalanan,** yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 196

## 2. Pengembangan Pola Distribusi Zakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw.<sup>8</sup>

Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>9</sup>

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan profesional. Lembaga atau Badan Amil Zakat bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *Mustahik* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salah satu tujuan dari zakat.<sup>10</sup>

Dalam mendistribusikan zakat, Badan atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat.

Diantara delapan *Mustahik* zakat yang telah ditentukan dalam firmanNya terdapat *sabilillah*. yang dimaksud *Sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju *ridha* Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan orang-orang yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jama'ah haji karena melaksanakan ibadah haji termasuk berjuang di jalan Allah.

Demikian juga termasuk dalam pengertian *fi sabilillah* adalah semua bentuk kebaikan seperti membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid.<sup>11</sup>

Menurut Al-Qasimi dalam tafsirannya di kemukakan, bahwa penyaluran zakat *fi sabilillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi yaitu asalkan menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ibit, 76

<sup>9</sup> Ibit, 76

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *OP Cit.*, 76.

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, 78

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, 78

Selanjutnya zakat merupakan salah satu solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aktivitas devisi pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mempunyai kinerja yang cukup baik, tetapi belum optimal.

Walaupun dana ZIS meningkat dari tahun ke tahun namun realisasinya masih kurang dari 0.02% dari potensi zakat yang ada (PDRB). Di sisi lain, program pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama, sehingga tujuan dan maksud dari pelaksanaan zakat sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekonomi fakir miskin belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, perubahan status dari penerima zakat (mustahik) fakir miskin menjadi pembayar zakat (muzakki) masih jauh dari realitasnya.

Meskipun demikian, peran penting yang dimainkan oleh lembaga pengumpulan zakat di daerah penelitian yang terpenting saat ini adalah: (1) Meringankan beban penderitaan sebagian kaum fakir miskin berupa bantuan biaya pendidikan, biaya sekolah, bantuan korban bencana alam. (2) meningkatkan status sosial diantara sejumlah fakir miskin menjadi munfiq (orang yang telah mampu membayar infaq). (3) Menciptakan beberapa lapangan kerja bagi mustahik. (4) Meningkatkan pendidikan dan kerampilan kaum perempuan dalam menggerakkan usaha rumah tangga. Berdasarkan analisis SWOT ditemukan bahwa peran srategi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan ekonomi perlu dilakukan hal-hal berikut: (1) untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin dilakukan melalui dana bergulir yang dikelola oleh MisYkat. (2) Sosialisasi zakat perlu ditingkatkan. (3) Kelembagaan amil zakat baik BAZ maupun LAZ perlu dibenahi untuk meningkatkan kepercayaan dari pembayar zakat.<sup>13</sup>

Selama ini potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Perkiraan besarnya potensi zakat di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai kalangan, misalnya, Dompot Dhuafa Republika memperkirakan potensi zakat minimal di Indonesia bisa mencapai angka Rp. 5,1 triliun

---

<sup>13</sup> Indirijatiningrum, Mustiko Rini, *Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis (Eksis) vol1 No.4 Okt-Des 2005.



per tahun. Angka tersebut diperoleh dengan perhitungan  $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp.}80.000$  <sup>14</sup> ( harga emas/ grm).

Asumsi yang digunakan adalah pendapatan setiap keluarga disamaratakan dengan nilai Rp. 6.800.000/ tahun atau senilai harga emas 85 gram.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Sudewo menghitung potensi zakat dengan cara mensimulasi jumlah penduduk muslim kaya dalam 3(tiga) bentuk skenario yaitu skenario minimal, menengah, dan ideal. Dari scenario minimal diperoleh angka potensi zakat sebesar Rp. 10,8 triliun per tahun, skenario menengah menghasilkan angka menjadi Rp. 21,6 triliun, dan skenario ideal sebesar Rp. 32,4 triliun

Pemberantasan kemiskinan di Indonesia diperankan bukan oleh pemerintah, melainkan lembaga-lembaga zakat. Terbukti dari angka pengentasan kemiskinan yang tinggi hanya dilakukan oleh pembagian Zakat.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, mengatakan negara tak mampu memberantas kemiskinan dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Kemiskinan, kemelaratan dan pengangguran di kalangan Muslim Indonesia maupun non-Muslim masih sangat besar.

"Negara Indonesia beruntung karena keterlibatan organisasi dan lembaga non-pemerintah yang terus meningkat," .

Menurut Azyumardi, melalui filantropi atau kedermawanan baik zakat, infak, shadaqah dan wakaf, mampu menciptakan kesejahteraan sosial. "Negara kita belum mampu menjalankan kesejahteraan itu. Karena manajemen pemerintah tidak baik. Korupsi terlalu banyak, merajalela," tambahnya.

Data dari BAZNAS menyebutkan, dampak distribusi zakat diantaranya mengurangi jumlah rumah tangga (RT) miskin sebanyak 21,10 persen atau sekitar sembilan hingga sepuluh juta.

Meski demikian, kata Azyumardi, hal tersebut bukan berarti menghilangkan peran negara dalam pemberantasan kemiskinan. Sebab, menciptakan kesejahteraan

---

<sup>14</sup>Ibit,h.1

<sup>15</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembangannya dalam Masa Kontemporer di Indonesia* (disampaikan pada seminar “Potensi Lembaga Keuangan Sosial dalam Sistem Keuangan Islam” di Universitas Islam Negeri Jakarta, Rabu 17 Januari 2007).hal.1

masyarakat merupakan kewajiban negara. "Bukan berarti menghilangkan tugas pokok negara untuk mengatasi kemiskinan. Kita hanya membantu," pungkasnya.

Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddin, mengatakan zakat sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meski demikian, negara memiliki andil dalam zakat. "Amil berperan penting dalam pengelolaan zakat. Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 8 tahun 2011, posisi amil diangkat ataupun disahkan oleh pemerintah,"<sup>16</sup> Adapun sebagai penyebab rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di lembaga pengumpul zakat antara lain : *Pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional seperti yang dinyatakan dalam Alquran dan hadits. Sementara sumber-sumber objek zakat yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan ekonomi moderen saat ini sudah semakin berkembang jenisnya. *Kedua*, kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu masih menyisakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat. Sehingga banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyalur zakat secara tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada individu yang dianggap berhak menerimanya. Dengan pola penyaluran zakat seperti ini kurang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian.<sup>17</sup>

Disamping itu, pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebut dalam Alquran dengan sasarannya hanya untuk konsumsi sesaat. Hal ini berdampak pada kecilnya porsi dana zakat yang diprioritaskan pada zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Dengan kata lain pendayagunaan zakat yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi umat belum mendapat perhatian. Sehingga ada kalangan yang menganggap bahwa konsep

---

<sup>16</sup> Halifuddin, Didin, Distribusi-zakat-terbukti-mengurangi-21-persen-warga-miskin, Tahun, 2012, h. 1

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, Op Cit, Hal 2.

zakat dalam operasionalnya masih merupakan suatu yang utopis untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.

Secara faktual, orang miskin dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama disebut *sail*, yaitu orang miskin yang memperlihatkan kemiskinannya kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan bantuan atau memintanya secara langsung. Sedangkan yang kedua disebut *mahrūm*, yaitu orang miskin yang tidak memperlihatkan kemiskinannya karena memiliki sifat '*iffah*' (menjaga harga diri). Islam memerintahkan agar kedua kategori orang miskin tersebut mendapat perhatian.

Pembagian zakat dengan cara mengundang orang-orang miskin datang secara massal ke rumah orang kaya atau LAZ merupakan fenomena tidak sehat. Sehingga mereka berdesak-desakan di halaman atau sampai antri mengular di bawah terik matahari adalah salah satu contoh distribusi zakat yang tidak mendidik. Selain mengikis sifat '*iffah*' yang merupakan *akhlaqul karimah*, hal ini menghilangkan rasa malu yang merupakan benteng moralitas seorang mukmin. Fenomena ini juga akan menimbulkan budaya 'kerja keras' dengan segala persaingannya untuk mendapat belas kasihan orang lain.

Dengan distribusi zakat yang tepat sasaran diharapkan akan mengubah *Mustahik* menjadi *muzakki*, *ibnu sabil* dapat melanjutkan kembali perjalanannya, kaum muslimin terbebas dari ancaman perbudakan (penindasan di negeri lain) dan pemurtadan, santri dan mahasiswa berprestasi dapat melanjutkan *thalabul 'ilmi*, korban bencana alam mendapatkan bantuan secukupnya, janda dan anak yatim mendapatkan pelayanan, perempatan jalan dan kolong jembatan bersih dari anak jalanan serta semua program-program kemanusiaan berjalan dengan baik.

Jika Sosialisme Marxis mencoba memecahkan problem kemiskinan dengan cara memaksa para *aghniya* (borjuis) untuk turun menjadi miskin dan menjalani hidup 'susah

---

<sup>18</sup> Ibit,2

bersama-sama', maka sistem Islam memecahkannya dengan cara memberdayakan orang-orang miskin agar menjadi *aghniya* <sup>19</sup>

Dalam Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Maksudnya, bila seorang muslim telah kena wajib zakat, tetapi tidak mau berzakat, maka ia bukan lagi saudara seagama. Hal ini secara tegas dikemukakan Alquran, "*Jika mereka bertaubat, mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, barulah mereka menjadi saudaramu seagama*". (QS.5:8).

Dengan demikian, orang yang mengabaikan kewajiban zakat, sesungguhnya telah melakukan keengkaran dan kedurhakaan besar kepada Allah. Karena itulah, ketika di masa Abu Bakar ada sebagian kaum muslimin yang mengaku muslim dan rajin shalat, tetapi enggan membayar zakat, Abu Bakar dengan nada marah mengeluarkan statemen yang artinya: *Demi Allah, aku akan perang siapa yang memisahkan shalat dengan zakat.*

Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat, tapi enggan membayar zakat, maka tidak ada shalat baginya.

Begitu eratnya keterkaitan shalat dan zakat, sehingga Ibnu Katsir mengatakan dalam Tafsirnya, (Amal seseorang itu tidak bermanfaat, kecuali dia menegakkan shalat dan menunaikan zakat sekaligus).

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah, di dalam Alquran perintah shalat dan zakat digandengkan sampai 82 kali. Ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan amal seorang muslim. Shalat merupakan *ibadah badaniyah* sedangkan zakat merupakan *ibadah maliyah*. Shalat merupakan hubungan vertikal kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial.

Dalam rangka memotivasi dan membangun masyarakat yang taat zakat, Islam tidak hanya mengumumkan *punishment* (*azab*) yang sangat keras bagi penolakannya (QS. 9:35, 41:7) dan memberikan *reward* (*jaza'*) yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. (QS. 30:39, 9:19), lebih dari itu, berbagai *credit point*, termasuk garansi dicurahkannya

---

<sup>19</sup> Dhofir, Farid, Lc, M.Si *Agar kaum dhuafa tetap punya harga diri, system distribusi zakat.* Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Tahun 2012, h.1

keberkahan dan pelipatgandaan asset bagi orang-orang yang membayar zakat (QS. 267).<sup>20</sup>

### **Problem Kemiskinan**

Tradisi mengemis kini sudah meruyak di mana-mana. Di kota-kota besar lahir kemiskinan gaya baru. Fuqara wal masakin (fakir miskin) sekarang sudah jadi fuqara masa kini. Kemiskinan tak lagi jadi cermin tingkat sosial, namun telah jadi profesi. Di trotoar antara Carrefour – Terminal Lebak Bulus, misalnya, ada tiga pengemis yang semuanya gemuk. Dalam mengemis, mereka ditemani botol Aqua berwarna kuning karena telah di-Extra Joss. Aneh, pengemis bertubuh gemuk. Bahkan seperti pemirsa TV yang lain, mereka pun membeli air bersih dan ekstra energi. Sungguh mereka bukan target market yang dibidik Aqua dan Extra Joss. Contoh lain, di depan kantor Standard Chartered Bank di bilangan segitiga emas, ada dua pengemis menggunakan handphone. Hebat bukan, apa karena di lingkungan bank internasional pengemis pun jadi sanggup membeli handphone.

Di tingkat amil, kemampuan mengelola zakat pun ternyata terbatas. Tradisinya bersifat kepanitiaan dengan pengelolaan paruh waktu. Karena tak ada waktu dan terbatasnya pengetahuan zakat, kegiatan amil tak beda dengan donatur: bagi-bagi santunan. Sebuah masjid besar di bilangan Menteng, contohnya, di Ramadhan ini bisa menghimpun zakat hampir Rp 1 milyar. Dari laporan diketahui, setengahnya habis terpakai selama Ramadhan untuk buka puasa dan santunan. Dana sebesar itu, ternyata tak bisa mengubah kondisi satu keluarga mustahik pun. Sayangnya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang profesional, dalam kampanyenya malah bangga dengan kegiatan konsumtif: buka bersama dhuafa dan napi, sembari bagi-bagi sembako.

Kita harus merubah paradigma distribusi zakat dari konsumtif oriented kepada produktif oriented, agar kemiskinan lebih efektif bisa diberantas. Bila kebiasaan konsumtif di atas berlanjut, niscaya zakat dan sedekah tak banyak pengaruhnya mengentaskan kemiskinan. Sedekah untuk konsumtif memang mulia. Hanya, jauh lebih mulia jika sedekah pun dijadikan modal untuk mengubah dhuafa. Kini saatnya kita mengubah paradigma berzakat. Memaksa bekerja lebih mulia ketimbang santunan.

---

<sup>20</sup> Agustianto, *Distribusi Zakat*, ZISWAF, Tahun, 2011, h.1

Untuk melakukan ini, maka berzakat sebaiknya diserahkan kepada lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya.

Esensi sedekah memang hibah yang harus diberikan kepada mustahik dimana harta yang diberikan itu menjadi miliknya, bukan disalurkan dalam bentuk pinjaman. Tetapi dalam konteks ini ada wilayah ijtihadi. Yaitu sistem distribusi dengan qardhul hasan dan bagi hasil, sehingga lebih menjamin terciptanya lapangan kerja baru yang efektif memberantas kemiskinan. Dengan terwujudnya lapangan kerja, sedekah pun merangsang profesionalitas yang pada gilirannya juga akan membangun etos kerja. Dengan memaksa fakir miskin bekerja, kegiatan rutin bagi-bagi santunan, akan terkikis. Bila metode distribusi ini yang dilakukan, maka sabda Nabi yang menjelaskan bahwa zakat akan menghapuskan kemiskinan dapat terwujud.<sup>21</sup>

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apalagi saat ini kondisi perekonomian global sedang mengalami krisis pangan dan krisis energi. Harga minyak dunia yang telah menembus 140 dolar per barel diperkirakan akan menambah jumlah orang miskin baru sebanyak 15 juta jiwa pada tahun ini. Keadaan tersebut diperparah lagi oleh kondisi riil perekonomian masyarakat yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan kajian Tim Indonesia Bangkit, upah riil petani pada tahun 2007 lalu mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Demikian pula dengan upah riil buruh bangunan, pembantu rumah tangga, dan tukang potong rambut yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 2 persen, 0,5 persen dan 2,5 persen (Beik dan Hakiem, 2008).

Untuk mengantisipasi dampak perekonomian global yang antara lain berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, yang di antaranya adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan BLT tersebut seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan

---

<sup>21</sup> Ibit,h.4

masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrument tersebut adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS).<sup>22</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih"*. Hadits tersebut secara eksplisit menegaskan posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Hadits tersebut juga mengingatkan akan besarnya kontribusi perilaku bakhil dan kikir terhadap kemiskinan.<sup>23</sup>

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya (Beik, 2008).

Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, sebagaimana yang saat ini menimpa AS, adalah melalui semangat dan mekanisme "berbagi" antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang

---

<sup>22</sup> Beik dan Hakiem, *Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II, Tahun 2009

<sup>23</sup> Ibit, hal. 1

akan dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif yang membangun (Beik, 2008).<sup>24</sup>

Zakat, sebagai salah satu ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, seharusnya apabila dijalankan dengan sebenar-benarnya, pasti akan meningkatkan kepekaan sosial bagi para MUZAKKI, menciptakan kedekatan, kemesraan dan terjalinnya komunikasi yang baik antara MUZAKKI dan MUSTAHIK, juga otomatis akan memunculkan kepercayaan diri, harga diri dan kebahagiaan tersendiri bagi para penerima zakat. Seperti yang di contohkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mencari dan memberi bahkan memanggul sendiri bantuan beras kepada seorang ibu yang saat itu sedang merebus batu demi “menipu” anaknya yang menangis kelaparan.

Yang terjadi di Indonesia Banyak Muzakki (*pembayar Zakat*) yang seharusnya mengeluarkan zakat demi kebutuhan untuk menyempurnakan ibadahnya, justru menganggap bahwa yang membutuhkan zakat adalah para Mustahik (*penerima Zakat*). Dengan congkaknya para Muzakki membagi-bagikan zakat dengan liputan pers dan perhatian khalayak bak selebritis, tetapi pernghargaan dan kepekaan mereka terhadap kaum lemah dan kaum miskin justru semakin menipis.

Mereka menganggap bahwa penerima zakat adalah orang yang membutuhkan. Semakin panjang antrian “*peminta zakat*” semakin bangga dan semakin congkaklah mereka. Bahkan dengan cara dan model pembagian zakat seperti ini, di beberapa tempat telah memakan korban sampai ada yang meninggal dunia.

Dengan cara dan model memberi zakat seperti itu, maka terkesan ada justifikasi bahwa mereka dibutuhkan oleh sekian orang. Dan sekian orang tergantung kepada mereka. **Bukan tergantung kepada Allah.** Inilah esensi zakat yang sesungguhnya ?

Organisasi Islam di Indonesia atau bahkan di dunia, harusnya mulai melakukan kajian-kajian dan terobosan pemikiran untuk merubah mindset para MUZAKKI dan para

---

<sup>24</sup> Ibit,2



MUSTAHIK agar mereka dapat kembali kepada arti dan esensi ZAKAT yang sebenarnya sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulnya.<sup>25</sup>

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya.<sup>26</sup>

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut “muzakki”, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut “Mustahik”. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati. Di dalam Alquran Allah telah berfirman sebagai berikut:<sup>27</sup>

*“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. Q.S. Al-Baqarah, 2:110*

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. Q.S. At-Taubah, 9:60.*

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

---

<sup>25</sup> Musri, Kustiono, *Apa yang salah dengan budaya distribusi, dari buah pemikiran KH M Ayub Saiful Ridjal*, [MAJALAN-GEMPUR.COM](http://MAJALAN-GEMPUR.COM), Tahun, 2012, h.1

<sup>26</sup> Ronquillo, Ullyses, *Manajemen Zakat*, Fix my Word, 2013, hal.1

<sup>27</sup> Ibit, hal.2

*ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Q. S. At-Taubah, 9:103.*

Adapun hadis yang dipergunakan dasar hukum diwajibkannya zakat antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut:

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw ketika mengutus Mu'az ke Yaman, ia bersabda: *"Sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari Ahli Kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka beritahukannlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka atas mereka salat lima kali sehari semalam; lalu jika mereka mentaatimu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka; kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan harta-harta mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara doa itu dan Allah tidak hijab (pembatas)".*

Adapun harta-harta yang wajib dizakati itu adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berharga, seperti emas dan perak.
2. Hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seperti padi, gandum, kurma, anggur.
3. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba.
4. Harta perdagangan.
5. Harta galian termasuk juga harta rikaz.<sup>28</sup>

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. *Fakir*, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha.
2. *Miskin*, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil*, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
4. *Muallaf*, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam.
5. *Riqab*, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka.

---

<sup>28</sup> Ibit, Hal.2

6. *Gharim*, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan membayarnya.
7. *Fi sabilillah*, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam.
8. *Ibnussabil*, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat).<sup>29</sup>

Pengelolaan harus berlandasakn Alquran dan Assunnah.

1. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
2. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
3. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain:

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik
3. Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Meningkatkan syiar Islam.
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, tampaknya sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

Zakat memiliki hikmah yang besar, bagi muzakki, mustahik, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih.

Bagi mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan suudzan terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan.

---

<sup>29</sup> Ibit,Hal.3

<sup>30</sup> Ibit,Hal.3

Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Sedangkan dalam tata masyarakat muslim tidak terjadi monopoli, melainkan sistim ekonomi yang menekankan kepada mekanisme kerja sama dan tolong-menolong.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di dibicarakan adalah menentukan VISI dan MISI dari lembaga zakat yang akan dibentuk.<sup>31</sup>

Bagaimana Visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas.

Selanjutnya adalah melakukan "pengelolaan zakat" sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan Mustahik, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*proactive*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun Mustahik dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nurhamidah, [\*Manajemen Zakat Pengelolaan Zakat\*](#), COPYRIGHT © 2012 DOMPET DHUFA. ALL RIGHTS RESERVED ,Tahun,2012,Hal.1

<sup>32</sup> Ibit,Hal.2

Empat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah ;<sup>33</sup>

(1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

(2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta.

Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustadz'afiin (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi).

Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana Qur'an sendiri menfirmankan, “...Kaila yakuna dhulatan Binal Aghniya'a Minkum...” agar harta itu tidak saja beredar diantara orang-orang kaya saja disekitarmu.

(3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan Mustahik. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap Mustahikpun juga demikian, program pendistribusian

---

<sup>33</sup> Ibit,Hal.3

dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana Mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status Mustahik berubah menjadi muzakki. Hal yang tidak kalah penting dalam hal masalah manajemen pengelolaan zakat adalah Pengesahan UU Pengelolaan Zakat yang dilakukan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 lalu telah menimbulkan debat publik yang sangat intensif, yang bermuara pada sejumlah isu krusial yang terdapat pada UU yang baru. Menurut Yusuf Wibisono, isuisu tersebut antara lain sentralisasi pengelolaan zakat via BAZNAS, marjinalisasi peran LAZ (Lembaga Amil Zakat) bentukan masyarakat dan kekhawatiran akan “diberangusnya” LAZ melalui aturan persyaratan sebagai ormas, serta ketidakadilan alokasi dana APBN yang hanya diberikan pada BAZNAS.<sup>34</sup>

Bagi penulis, munculnya kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ada perspektif lain yang harus kita pahami sehingga kekhawatiran tersebut bisa diminimalisir. Pertama, harus diakui bahwa kekhawatiran akan terjadinya marjinalisasi kekuatan masyarakat sipil, antara lain dipicu oleh Pasal 17 UU yang baru, dimana fungsi LAZ hanya untuk membantu BAZNAS. Kata “membantu” diartikan seolah-olah ada hubungan struktural vertikal antara LAZ dengan BAZNAS. Padahal jika kita telaah lebih dalam, pasal 17 tersebut tidak menegaskan secara eksplisit, karena hubungan tersebut hanya ada pada BAZNAS pusat hingga daerah. Fungsi LAZ pun tetap sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, serta membuat laporan pertanggungjawaban.

Perbedaannya dengan UU lama, dalam UU baru ini ditegaskan kewajiban LAZ untuk melaporkan kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukannya kepada BAZNAS (Pasal 19), dan bukan kewajiban untuk menyetorkan zakat kepada BAZNAS. Hal ini dimaksudkan agar konsolidasi dan sinergi antar organisasi pengelola zakat dapat “diformalkan” melalui undang-undang, karena salah satu masalah pengelolaan zakat saat ini adalah masih belum optimalnya sinergi OPZ sehingga terkesan masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Syaqui Beik, Irfan, Dr. [Menatap pengelolaan zakat](#), Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB, 2012, hal.1

<sup>35</sup> Ibit, hal.1

Selanjutnya, yang sering menjadi faktor penghambat sinergi BAZ dan LAZ adalah “paradigma kompetisi” ala ekonomi konvensional. BAZ dan LAZ dianggap sebagai kompetitor yang akan saling “memakan” satu sama lain. Akibatnya, masing-masing lembaga akan menganggap institusi lainnya sebagai pesaing. Terkadang di lapangan, kita melihat adanya persaingan yang kurang “berakhlak”. Ini adalah perspektif yang sangat tidak Islami. Seharusnya, antara satu dengan yang lain mengembangkan konsep ta’awwun dan fastabiqul khairat. Sehingga walaupun muncul semangat berkompetisi, yang muncul adalah kompetisi yang akan mengokohkan bangunan zakat ke depannya, bukan kompetisi yang self-destructive.

Adapun tuduhan bahwa strukturalisasi BAZNAS hingga ke tingkat kota/kabupaten akan mendorong inefisiensi pengelolaan zakat, menurut penulis hal tersebut juga kurang tepat. Justru yang diperlukan adalah peningkatan layanan masyarakat, baik masyarakat muzakki maupun mustahik, yang antara lain membutuhkan ketersediaan jaringan kantor dan SDM yang mampu menjangkau setiap pelosok negeri ini.<sup>36</sup>

Selanjutnya untuk dapat melihat permasalahan yang terjadi dalam distribusi zakat, maka perlu adanya gambaran yang menyoroti secara umum tentang fenomena yang selama ini terjadi dalam distribusi zakat, serta apa yang sebetulnya harus diantisipasi dalam hal distribusi atau penyaluran zakat.

Firman Allah SWT: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Zariyat (51): 19) Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko.

Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja

---

<sup>36</sup> Ibit, hal 2

karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.<sup>37</sup>

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Alquran Surah Al Hasyr ayat 7.<sup>38</sup>

Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Secara teknik, zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan).

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang soio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.<sup>39</sup>

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Hal itu mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

---

<sup>37</sup> Gamal, Mesra, *Memahami zakat sebagai sarana distribusi kesejahteraan*, Kompas.Com, Copyright © 2011, hal.1

<sup>38</sup> Ibit, hal.1

<sup>39</sup> Ibit, Hal.2



Sebagai contoh adalah pemberian zakat di bulan Ramadhan yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari Raya, dan setelah hari Raya mereka kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu berdikari, sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya. Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

Dengan demikian dana zakat, juga infaq & sadaqah, hanya dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi orang-orang yang benar-benar tidak dapat menghidupi dirinya lewat usahanya sendiri karena ia seorang yang menderita cacat seumur hidup atau telah uzur. Sedangkan bagi yang lain, dana tersebut harus digunakan sebagai bantuan keringanan temporer disamping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materi sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.<sup>40</sup>

Dengan demikian, penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan industri kecil-mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Zakat, sebenarnya, bukan monopoli ajaran Islam karena instrumen sejenis juga ditemui dalam ajaran lain. Dalam ajaran Hindu disebut "datria datrium", ajaran Budha menyebut "sutta nipata", sedangkan ajaran Kristiani mengenal "tithe" yang didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seseorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatannya, dan membantu orang miskin. Dalam kenyataan di lapangan, "tithe" lebih berhasil dibandingkan "zakat", padahal kewajiban "tithe" adalah 10%, sedangkan "zakat" hanya 2,5%.<sup>41</sup>

Menurut ajaran Islam, pembayaran zakat bukan merupakan suatu bentuk kepemihakan kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut.

---

<sup>40</sup> Ibit, Hal.3

<sup>41</sup> Ibit, Hal.3

Mereka hanya pembawa amanah sebagaimana yang dikemukakan dalam Surah Al Hadiid ayat 7. Si kaya harus membelanjakan hartanya menurut persyaratan amanah dan yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.

Diharapkan setiap Muslim yang sadar akan kewajiban agamanya, selalu bersedia membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah SWT dalam kekayaannya di dunia dan akhirat.

### DAFTAR PUSTAKA

**Agustianto**, *Distribusi Zakat*, ZISWAF, Tahun, 2011, h.1

**Beik dan Hakiem**, *Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II, Tahun 2009

**Departemen Agama RI**, *Alquran*

**Dhofir, Farid, Lc, M.Si** *Agar kaum dhuafa tetap punya harga diri, system distribusi zakat*. Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Tahun 2012,

**Gamal, Mesra**, *Memahami zakat sebagai sarana distribusi kesejahteraan*, Kompas.Com, Copyright © 2011

**Halifuddin, Didin**, *Distribusi-zakat-terbukti-mengurangi-21-persen-warga-miskin*, Tahun, 2012

**Ismail, Nawawi**, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010

**Indirijatiningrum, Mustiko Rini**, *Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis (Eksis) vol1 No.4 Okt-Des 2005

**Jamaliah Said (PhD) 1Sharifah Norzehan Syed Yusuf (PhD)**, *Kemiskinan Proyek Pengentasan Zakat Distribusi: Peran Organisasi Belajar di Memastikan Sukses Proyek*, International Conference on Islamic Economics and Finance International Conference on Islamic Economics and Finance, 2012

**Mustafa Edwin Nasution**, *Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembangannya dalam Masa Kontemporer di Indonesia* (disampaikan pada seminar

“Potensi Lembaga Keuangan Sosial dalam Sistem Keuangan Islam” di Universitas Islam Negeri Jakarta, Rabu 17 Januari 2007

**Musri, Kustiono**, *Apa yang salah dengan budaya distribusi, dari buah pemikiran KH M Ayub Saiful Ridjal*, [MAJALAN-GEMPUR.COM](http://MAJALAN-GEMPUR.COM), Tahun,2012

**Nurhamidah**, [\*Manajemen Zakat Pengelolaan Zakat\*](#), COPYRIGHT © 2012 DOMPET DHUAFA. ALL RIGHTS RESERVED ,Tahun,2012

**Ronquillo**, **Ullyses**, *Manajemen Zakat*, Fix my Word, ,2013

**Syauqi Beik, Irfan,Dr.** [\*Menatap pengelolaan zakat\*](#) ,Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB, 2012,